

Dinamika Asimetri Informasi dalam Audit, Pajak dan Tata Kelola (Kajian Studi Pustaka pada Koperasi)

Lalu Nova Saza Yusma*

Fakultas Ekonomi, Universitas Gunung Rinjani, Indonesia

*Penulis korespondensi: lnova8512@gmail.com¹

Abstract. *Information asymmetry in the context of cooperative taxation is a critical issue with significant implications for tax compliance, governance, and organizational sustainability. This imbalance arises when cooperative management possesses broader access to financial and tax-related information compared to members and tax authorities. This study adopts a descriptive qualitative approach through a literature review of 10–20 national articles indexed in Sinta and reputable international journals published between 2015 and 2025. Data were analyzed using content analysis techniques to identify patterns, compare findings, and examine interconnections among previous studies, with research validity maintained through source triangulation. The findings indicate that tax-related information asymmetry in cooperatives is influenced by weak implementation of Good Cooperative Governance (GCG) principles, low levels of tax and accounting literacy among members, limited transparency of tax reporting, and underperformance of internal oversight mechanisms. These conditions result in low tax compliance, increased risk of moral hazard, and declining governance credibility. This study highlights the necessity of strengthening cooperative governance through the substantive application of GCG principles, enhancing members' tax literacy, and ensuring consistent internal and external supervision to achieve accountable and tax-compliant cooperatives.*

Keywords: *Accountability; Cooperatives; Governance; Information Asymmetry; Taxation*

Abstrak. Asimetri informasi dalam konteks perpajakan koperasi merupakan isu penting yang berimplikasi pada kepatuhan pajak, tata kelola, dan keberlangsungan organisasi. Ketimpangan informasi muncul ketika pengurus koperasi memiliki akses lebih luas terhadap informasi keuangan dibandingkan anggota maupun otoritas pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dengan menelaah 10–20 artikel nasional terindeks Sinta dan jurnal internasional bereputasi pada periode 2015–2025. Analisis dilakukan dengan teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi pola, membandingkan temuan, serta menelaah keterkaitan antarpencapaian, dengan validitas dijaga melalui triangulasi sumber. Hasil kajian menunjukkan bahwa asimetri informasi dalam pajak koperasi dipengaruhi oleh lemahnya penerapan prinsip *Good Cooperative Governance* (GCG), rendahnya literasi pajak dan akuntansi anggota, keterbatasan transparansi laporan pajak, serta pengawasan internal yang belum optimal. Konsekuensinya meliputi rendahnya kepatuhan pajak, meningkatnya risiko moral hazard, serta menurunnya kredibilitas tata kelola. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan tata kelola koperasi melalui penerapan GCG yang substantif, peningkatan literasi perpajakan anggota, serta pengawasan internal dan eksternal yang konsisten untuk mewujudkan koperasi yang akuntabel dan patuh pajak.

Kata kunci: Akuntabilitas; Asimetri Informasi; Koperasi; Pajak; Tata Kelola

1. LATAR BELAKANG

Koperasi di Indonesia memegang peran strategis sebagai sokoguru perekonomian rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Namun, kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih relatif rendah, yakni kurang dari 2% (Kemenkop UKM, 2020). Kondisi ini mengindikasikan bahwa fungsi koperasi sebagai pilar ekonomi belum optimal. Salah satu penyebab mendasar adalah lemahnya tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas keuangan, termasuk dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Koperasi yang merupakan badan usaha beranggotakan dan memiliki peran strategis dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, seperti yang telah diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “perekonomian

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Realitas ini menunjukkan bahwa peran koperasi belum optimal dan perlu diperkuat melalui pengelolaan yang profesional dan akuntabel.

Sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, dari sekitar 150.000 koperasi yang terdaftar, lebih dari 30% berada dalam status tidak aktif. Penguatan koperasi tidak dapat dilepaskan dari kondisi faktual di lapangan. Data dari Dinas Koperasi Kabupaten Lombok Timur mengungkapkan bahwa dari 508 koperasi yang terdaftar, hanya 262 yang masih aktif, sementara 32 koperasi telah dibubarkan karena masalah tata kelola dan pelaporan keuangan yang buruk (Yusma, 2021). Namun dari data koperasi Lombok Timur 2024 menunjukkan bahwa 333 unit koperasi yang aktif sedangkan yang tidak aktif 294 unit koperasi (NTB, 2024). Selain itu, fluktuasi kinerja keuangan koperasi, seperti yang terlihat pada Koperasi Suka Damai antara tahun 2013 hingga 2017, memperlihatkan inkonsistensi dalam Sisa Hasil Usaha (SHU) meskipun rasio keuangannya masih dalam batas aman (Adrianus, 2020). Pelaporan keuangan koperasi pun sering kali hanya sebatas formalitas dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), tanpa pemahaman substantif oleh pengurus atau anggota koperasi, bahkan tidak sedikit laporan yang disusun oleh pihak eksternal (Yusma, 2021). Laporan akuntansi harus dilihat sebagai *social artefacts* yang bertujuan membantu para pengguna dalam membuat keputusan yang rasional. Ketika laporan keuangan hanya dimaknai sebagai alat formalitas atau administratif, maka esensi akuntansi sebagai penyampai pesan informasi hilang.

Penelitian Novatiani *et al.*, (2023) menambahkan bahwa kelemahan pengendalian internal dan ketiadaan audit independen menyebabkan rendahnya kredibilitas laporan keuangan koperasi. Hal ini sangat terkait dengan kepatuhan pajak karena otoritas pajak bergantung pada validitas laporan keuangan koperasi untuk menilai kewajiban pajaknya. Widiyanto & Utomo (2022) juga menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan faktor paling menentukan dalam membangun kepercayaan anggota sekaligus meningkatkan legitimasi koperasi di mata pihak eksternal, termasuk regulator. Dengan demikian, persoalan asimetri informasi dalam pajak koperasi bukan hanya bersifat teknis, melainkan juga struktural dan kultural. Secara struktural, lemahnya penerapan GCG, keterbatasan sistem informasi akuntansi, dan absennya mekanisme audit internal maupun eksternal membuat laporan pajak koperasi rawan bias. Secara kultural, rendahnya literasi pajak dan akuntansi anggota memperlemah posisi mereka dalam pengawasan, sehingga dominasi pengurus semakin besar.

Salah satu akar masalah dalam pengelolaan koperasi adalah asimetri informasi. Permasalahan tersebut menunjukkan kelemahan mendasar pada penerapan prinsip-prinsip

Good Cooperative Governance (GCG), seperti transparansi, akuntabilitas, kemandirian, keadilan, dan tanggung jawab. Ditambah lagi dengan rendahnya literasi akuntansi pengurus koperasi, pelaporan keuangan yang belum mengikuti standar SAK-EMKM atau PSAK 27, serta minimnya partisipasi aktif anggota koperasi. Hal ini menimbulkan kesenjangan informasi (*information gap*) antara pengurus dan anggota. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Seisarita, 2015) yang menyebutkan bahwa informasi akuntansi yang disampaikan kepada anggota koperasi cenderung teknis dan tidak mudah dipahami. Hal ini menciptakan celah bagi ketidakseimbangan kekuasaan dan kontrol antara manajemen koperasi dan para anggotanya. Dalam perspektif akuntansi, kondisi tersebut merupakan wujud nyata dari informasi asimetris, di mana pihak yang memiliki akses penuh terhadap laporan keuangan (pengurus) memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh pihak lain (anggota). Nainggolan, Parulian, dan Siregar (2016) menegaskan bahwa lemahnya penerapan prinsip *Good Cooperative Governance* (GCG), khususnya transparansi dan akuntabilitas, memperburuk kondisi tersebut.

Beberapa solusi jangka pendek telah dilakukan seperti pelatihan teknis, revisi AD/ART, dan pendampingan kelembagaan. Namun, pendekatan tersebut bersifat *ad hoc* dan tidak terintegrasi dalam kerangka evaluasi yang sistematis. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, keberlangsungan dan efektivitas koperasi mulai dipertanyakan akibat lemahnya sistem pengelolaan dan transparansi informasi yang disampaikan kepada anggota. Akibatnya, akar masalah tidak terselesaikan, dan koperasi cenderung mengalami stagnasi bahkan kegagalan kelembagaan. Penelitian terdahulu banyak menyoroti aspek tata kelola koperasi (Budiyo and Indah 2018, dan Nainggolan, Parulian, and Siregar 2016), partisipasi anggota (Soebijono 2016) dan sistem informasi manajemen koperasi (Jumaidi and Lestari 2021).

Tinjauan terhadap berbagai studi terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan riset. Penelitian sebelumnya cenderung sektoral misalnya, tata kelola koperasi (Novatiani *et al.*, 2023), (Yusma, 2021), kualitas laporan keuangan (Dyah *et al.*, 2021), atau aspek hukum koperasi syariah (Sofiani, 2014), tanpa membangun model integratif antara aspek kelembagaan, akuntansi, dan legalitas. Di sisi lain, pendekatan teoretis masih didominasi oleh *Stewardship Theory* yang menekankan pada moralitas pengurus, namun belum menyentuh akar struktural masalah berupa asimetri informasi antara pengurus dan anggota koperasi.

Penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada tata kelola koperasi secara umum (Budiyo and Indah 2018, dan Nainggolan, Parulian, and Siregar 2016), partisipasi anggota (Soebijono, 2016), kualitas laporan keuangan (Dyah *et al.*, 2021), serta peran audit internal dalam meningkatkan akuntabilitas (Sari, 2023; Savitri *et al.*, 2023), namun kajian yang secara spesifik membahas asimetri informasi dalam konteks perpajakan koperasi masih sangat

terbatas; oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa fokus analisis pada dinamika asimetri informasi perpajakan, pendekatan integratif yang mengaitkan literasi pajak anggota, penerapan *Good Cooperative Governance* (GCG), serta efektivitas audit internal maupun eksternal dalam mempersempit kesenjangan informasi, sekaligus penyusunan model konseptual yang menempatkan kepatuhan pajak sebagai indikator utama keberhasilan tata kelola koperasi, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengayaan literatur mengenai asimetri informasi pajak koperasi dan kontribusi praktis dalam bentuk rekomendasi strategi penguatan tata kelola koperasi yang akuntabel, patuh pajak, dan berkelanjutan.

Dari sisi partisipasi, Soebijono, Binawati, dan Erstiawan (2016) menemukan bahwa rendahnya keterlibatan anggota dalam RAT menyebabkan lemahnya fungsi kontrol terhadap pengurus. Rendahnya literasi keuangan anggota juga memperbesar ketimpangan pemahaman, sebagaimana dibuktikan oleh Yusma & Sakti (2021), yang menyebutkan bahwa anggota kesulitan memahami laporan keuangan koperasi. Kondisi ini juga berimplikasi pada kewajiban perpajakan koperasi. Banyak laporan keuangan yang tidak sesuai standar (SAK-EMKM atau PSAK 27), sehingga berpotensi mengurangi kepatuhan pajak dan memperbesar risiko moral hazard.

Dalam konteks ini, pendekatan Asimetri Informasi memandang akuntansi sebagai proses komunikasi antara pihak internal (manajemen) dan eksternal (pemakai informasi). Gagalnya komunikasi menyebabkan kesenjangan informasi, yang berujung pada lemahnya pengambilan keputusan ekonomi. Manossoh (2016;58) menekankan pentingnya prinsip *decision usefulness* dan *standard of disclosure* untuk memastikan bahwa informasi keuangan tidak hanya disampaikan, tetapi juga dapat digunakan secara bermakna oleh para anggota koperasi. Solusi yang ditawarkan tidak cukup dengan penguatan etika pengurus (*moral hazard control*), tetapi juga harus melalui, Pengungkapan wajib yang terstandar berbasis SAK-EMKM atau PSAK 27 sebagai upaya pengurangan asimetri informasi. Sistem umpan balik berbasis RAT partisipatif, agar anggota mendapatkan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan sesuai prinsip *decision usefulness*. Audit independen sebagai bentuk verifikasi eksternal untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan koperasi.

Koperasi sebagai badan usaha berbasis keanggotaan memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih tergolong rendah. Salah satu persoalan utama yang dihadapi koperasi saat ini adalah lemahnya transparansi dan komunikasi informasi keuangan antara pengurus dan anggota. Ketimpangan informasi ini merupakan manifestasi nyata dari asimetri informasi, yang

berpotensi menurunkan partisipasi anggota dan mengganggu keberlanjutan kelembagaan koperasi. Permasalahan ini mengarah pada kegagalan fungsi akuntansi sebagai alat komunikasi organisasi, dimana akuntansi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Tujuan penelitian menganalisis penyebab dan dampak asimetri informasi dalam perpajakan koperasi, mengidentifikasi peran *Good Cooperative Governance* dan mekanisme pengawasan dalam mengurangi asimetri informasi pajak, dan memberikan rekomendasi strategi penguatan tata kelola koperasi agar lebih akuntabel dan patuh pajak. Melalui pendekatan studi pustaka dari berbagai literatur yang ditemukan, penelitian diharapkan dapat menyimpulkan penyebab terjadinya kegagalan informasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data penelitian diperoleh dari literatur sekunder berupa artikel ilmiah, buku, dan laporan resmi yang relevan dengan topik koperasi, tata kelola, dan akuntansi. Dari sekitar 300 sumber yang ditelaah, peneliti menyeleksi 10–20 sumber utama yang paling relevan dan kredibel. Kriteria pemilihan literatur adalah sebagai berikut: (1) Dipublikasikan dalam jurnal nasional terindeks Sinta (peringkat 5–2) maupun jurnal internasional bereputasi. (2) Terbit pada periode 2015–2025, sehingga tetap kontekstual dengan perkembangan terkini. (3) Memiliki fokus pembahasan pada isu asimetri informasi, tata kelola koperasi, literasi keuangan, dan standar pelaporan akuntansi.

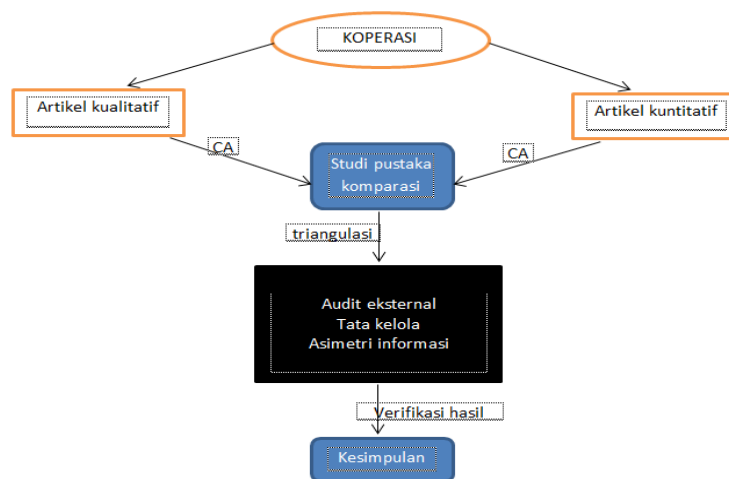
Analisis data dilakukan dengan teknik Content Analysis (CA), yaitu mengidentifikasi pola, perbedaan, serta keterkaitan antar penelitian terdahulu. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan hasil temuan dari berbagai literatur untuk memperoleh gambaran yang lebih obyektif. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi yang sistematis guna menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian.

Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir penelitian ini dirancang untuk menelusuri fenomena asimetri informasi dalam koperasi dengan menitikberatkan pada peran audit internal dan penerapan prinsip *Good Cooperative Governance* (GCG). Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab asimetri informasi melalui hasil temuan studi pustaka. Selanjutnya, temuan tersebut dianalisis dengan pendekatan *content analysis*, sehingga terbentuk pemetaan hubungan antara asimetri informasi yang terjadi karena ketimpangan akses informasi pengurus dan anggota, Peran audit internal koperasi sebagai mekanisme pengendalian dan pengawasan,

Penerapan GCG yang menekankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam tata kelola koperasi.

Kerangka ini menegaskan bahwa audit internal dapat dijadikan instrumen utama untuk memperkecil kesenjangan informasi dengan memastikan transparansi laporan keuangan dan efektivitas fungsi pengawasan. Dengan demikian, penerapan tata kelola koperasi berbasis *Good Cooperative Governance* akan lebih optimal dan mampu meningkatkan partisipasi anggota. Secara konseptual, penelitian ini memposisikan akuntansi sebagai media komunikasi antara pengurus dan anggota. Dengan akuntansi yang akuntabel, transparan, dan diaudit secara internal maupun eksternal, kesenjangan informasi dapat diminimalisir, sehingga koperasi dapat dikelola secara berkelanjutan.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian.

3. HASIL

Hasil temuan pada berbagai literatur penelitian yakni literatur menunjukkan bahwa asimetri informasi terjadi karena pengurus memiliki akses dominan terhadap informasi keuangan dibanding anggota. Selain itu, dalam aspek perpajakan koperasi terjadi karena pengurus memiliki akses dominan terhadap data keuangan dan informasi pajak dibandingkan anggota maupun otoritas pajak.. Laporan keuangan seringkali hanya menjadi formalitas RAT sehingga memperbesar *information gap* (Iswandi, 2025). Kelemahan penerapan prinsip *Good Cooperative Governance* (GCG), khususnya transparansi dan akuntabilitas, menjadi faktor kunci yang memperburuk asimetri informasi (Nainggolan, Parulian and Siregar, 2016). Rendahnya partisipasi anggota dalam RAT menyebabkan minimnya fungsi kontrol anggota terhadap pengurus (Soebijono, Binawati and Erstiawan, 2016). Rendahnya literasi pajak dan akuntansi anggota menyebabkan mereka tidak memahami implikasi kewajiban pajak koperasi, sehingga peran mereka dalam pengawasan hampir tidak terlihat (Yusma and Sakti, 2021).

Lemahnya pengendalian internal serta ketiadaan audit independen menyebabkan kredibilitas laporan keuangan diragukan, sehingga informasi yang diterima anggota rawan bias (Novatiani *et al.*, 2023). Temuan literatur menegaskan bahwa audit internal dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang memperkecil kesenjangan informasi. Keberadaan audit internal dalam koperasi terbukti meningkatkan kepercayaan anggota serta memperkuat partisipasi RAT (Sanjaya and Febrian 2024) dan (Savitri, Puspitasari, and Maharani 2023).

Faktor utama yang mendorong konversi koperasi ke syariah adalah dukungan regulasi, promosi, dan tingkat bagi hasil, sedangkan faktor agama, informasi, dan citra hanya menjadi faktor pendukung. Selain itu, beberapa literatur menegaskan bahwa lemahnya pengendalian internal serta tidak optimalnya audit internal dan eksternal mengakibatkan kredibilitas laporan keuangan dan pajak koperasi diragukan (Novatiani *et al.*, 2023). Hal ini berdampak pada rendahnya kepatuhan pajak, meningkatnya risiko moral hazard, hingga munculnya praktik manipulasi laporan keuangan. Sebaliknya, studi menunjukkan bahwa audit internal maupun pengawasan eksternal dapat mempersempit kesenjangan informasi dengan memastikan laporan pajak disusun sesuai standar akuntansi dan ketentuan perpajakan, sekaligus meningkatkan kepercayaan anggota dan regulator (Sanjaya & Febrian, 2024; Savitri *et al.*, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal lebih dominan dibanding faktor religiusitas dalam keputusan koperasi untuk bertransformasi (Apriyana and Hasbi, 2020). Pendidikan koperasi berjalan baik, namun tingkat partisipasi anggota masih berada pada kategori cukup, terutama dalam aspek permodalan, rapat anggota, dan pemanfaatan usaha. Meskipun pemahaman meningkat, implementasi partisipasi masih terbatas (Ramadhan, 2018). Karakteristik individu anggota berhubungan signifikan dengan kohesivitas kelompok, yang merupakan faktor penting untuk menjaga keberlangsungan koperasi. Kohesivitas yang kuat meningkatkan efektivitas komunikasi dan kerja sama antaranggota.

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) seperti transparansi, akuntabilitas, independensi, dan fairness, serta audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sangat penting untuk meningkatkan kinerja koperasi. Akuntabilitas menjadi faktor yang paling menonjol dalam membangun kepercayaan anggota (Widiyanto and Utomo, 2022). Penerapan prinsip GCG, khususnya transparansi dan akuntabilitas, sudah baik. Namun, penerapan sistem informasi masih kurang optimal, sehingga efektivitas pengelolaan data belum maksimal (Soebijono, 2016). Faktor-faktor dalam *fraud diamond* (tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kapabilitas) mempengaruhi terjadinya fraud. Lemahnya sistem pengendalian internal membuat koperasi rentan terhadap kecurangan akuntansi (Dhon *et al.*, 2020). Kualitas sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, serta pemanfaatan teknologi informasi

terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan digitalisasi adalah kunci peningkatan akuntabilitas laporan. Analisis trend periode 2012–2015 menunjukkan aset, pasiva, dan SHU meningkat dari tahun ke tahun (Dwiyana, 2019). Pengendalian internal yang baik mampu menekan tingkat fraud di koperasi simpan pinjam. Audit internal dan peran pengurus dalam pengawasan terbukti penting untuk menjaga integritas laporan keuangan. Asimetri informasi, sosialisasi, dan ukuran usaha berpengaruh signifikan terhadap pemahaman UMKM mengenai SAK-ETAP. Edukasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci dalam meningkatkan akuntabilitas UMKM dan koperasi (Yusran 2019). Satuan pengawas internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan koperasi. Temuan menariknya adalah akuntabilitas berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan tersebut. Dengan demikian, audit internal tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga strategis dalam mempersempit asimetri informasi serta meningkatkan kepercayaan anggota terhadap laporan keuangan yang disajikan (Sari, 2023).

Hasil regresi linier menunjukkan budaya kerja yang meliputi disiplin, ketegasan dalam keputusan, serta rasa percaya diri berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan dalam aspek kualitas, kuantitas, kerjasama, dan tanggung jawab Moron, et al (2023). Fraud dipicu oleh tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kapabilitas, serta diperparah oleh lemahnya pengendalian internal, kompensasi yang tidak seimbang, budaya organisasi permisif, hingga rendahnya integritas pengurus. Kasus BMT Nur Ummah Solo menjadi studi kasus nyata di mana manipulasi laporan keuangan dan anggota fiktif merugikan koperasi Tania, et al, (2025). prinsip GCG berupa transparansi dan akuntabilitas, serta manajemen risiko berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun, prinsip responsibility, independence, fairness, dan budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak semua prinsip GCG berimplikasi sama terhadap kinerja koperasi Lestari and Purwantini, (2023). Akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kesetaraan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan koperasi, sementara transparansi justru berpengaruh negatif signifikan, menandakan bahwa keterbukaan yang berlebihan dapat menimbulkan konflik internal Handayani and Darmawan, (2024).

Secara umum, temuan literatur menegaskan bahwa asimetri informasi dalam pajak koperasi dipengaruhi oleh (1) dominasi informasi oleh pengurus, (2) rendahnya literasi pajak anggota, (3) lemahnya implementasi prinsip GCG, serta (4) tidak optimalnya mekanisme audit internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut berdampak pada menurunnya kepatuhan pajak koperasi dan menimbulkan kerentanan terhadap praktik kecurangan.

4. PEMBAHASAN

Perpajakan koperasi

Berdasarkan hasil telaah literatur, penelitian ini menegaskan bahwa asimetri informasi dalam aspek perpajakan koperasi merupakan persoalan mendasar yang berdampak langsung pada tingkat kepatuhan pajak, efektivitas tata kelola, dan keberlanjutan kelembagaan. Asimetri informasi terutama disebabkan oleh dominasi pengurus dalam menguasai data keuangan dan informasi pajak, lemahnya penerapan prinsip *Good Cooperative Governance* (GCG), rendahnya literasi pajak dan akuntansi anggota, serta belum optimalnya mekanisme audit internal dan eksternal. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya partisipasi anggota, meningkatnya risiko moral hazard, hingga turunnya kredibilitas laporan pajak dan keuangan koperasi di mata regulator maupun publik.

Sebaliknya, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan audit internal dan pengawasan eksternal yang konsisten dapat berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mempersempit kesenjangan informasi, meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, serta menumbuhkan kepercayaan anggota terhadap pengelolaan pajak koperasi. Dengan demikian, strategi penguatan koperasi harus diarahkan pada penerapan prinsip GCG yang substantif, peningkatan literasi perpajakan anggota, dan integrasi sistem pengawasan internal maupun eksternal.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas kajian asimetri informasi dengan menempatkan perpajakan koperasi sebagai isu utama yang sebelumnya belum banyak disentuh oleh riset terdahulu. Secara praktis, penelitian ini menawarkan rekomendasi penguatan tata kelola koperasi agar lebih akuntabel, patuh pajak, dan berkelanjutan melalui kombinasi literasi pajak anggota, tata kelola berbasis GCG, serta pengawasan multi-level.

Audit internal dan pengawasan

Hasil penelitian Sanjaya dan Febrian (2024) serta Savitri, Puspitasari, dan Maharani (2023) menegaskan bahwa keberadaan audit internal dalam koperasi tidak hanya sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menciptakan akuntabilitas. Audit internal berfungsi untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh pengurus benar-benar mencerminkan kondisi riil koperasi, sehingga dapat mempersempit information gap antara pengurus dan anggota. Penelitian Sari (2023) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa akuntabilitas mampu menjadi variabel moderasi yang memperkuat hubungan satuan pengawas internal dengan kualitas laporan keuangan. Hal ini memberikan implikasi bahwa efektivitas audit internal sangat

dipengaruhi oleh sejauh mana prinsip akuntabilitas diterapkan secara konsisten dalam pengelolaan koperasi.

Dari perspektif ilmiah, audit internal dapat dipahami sebagai bagian dari internal control system yang sejalan dengan kerangka COSO (Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission). Kerangka COSO menekankan lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Apabila audit internal koperasi difungsikan secara optimal, kelima komponen ini dapat berjalan sinergis sehingga mengurangi peluang terjadinya fraud, moral hazard, maupun manipulasi informasi. Dengan demikian, audit internal berperan sebagai “jembatan informasi” yang tidak hanya memastikan transparansi, tetapi juga memperkuat legitimasi pengurus di mata anggota.

Literatur menegaskan bahwa koperasi sebagai organisasi berbasis keanggotaan tidak lepas dari potensi kecurangan akuntansi (*accounting fraud*). Dhon et al. (2020) menyoroti bahwa faktor-faktor dalam fraud diamond yakni tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kapabilitas (*capability*) menjadi determinan utama terjadinya fraud. Dalam konteks koperasi, tekanan muncul dari kebutuhan untuk menunjukkan kinerja keuangan yang baik, baik kepada anggota maupun regulator. Peluang terjadi karena lemahnya sistem pengendalian internal. Rasionalisasi biasanya dibangun dengan alasan “demi kepentingan koperasi,” padahal sesungguhnya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan kapabilitas terkait dengan keahlian dan akses individu tertentu yang memungkinkan mereka melakukan manipulasi tanpa mudah terdeteksi.

Kasus nyata BMT Nur Ummah Solo (Tania et al., 2025) memperlihatkan bahwa fraud tidak semata-mata akibat faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya organisasi yang permisif dan lemahnya nilai integritas pengurus. Manipulasi laporan keuangan serta pencatatan anggota fiktif menjadi bukti konkret bahwa fraud dalam koperasi sering kali berakar dari kombinasi lemahnya pengawasan internal dan minimnya moralitas pengurus. Penelitian Dwiyanana (2019) menunjukkan sisi positif, di mana koperasi dengan pengendalian internal yang baik mampu menekan terjadinya fraud sekaligus menunjukkan pertumbuhan aset dan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang stabil. Hal ini menegaskan bahwa sistem pengendalian internal yang kuat tidak hanya berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap kecurangan, tetapi juga sebagai prasyarat bagi keberlanjutan usaha koperasi.

Dari perspektif teori tata kelola, pengendalian internal yang baik sejalan dengan konsep *three lines of defense*: (1) Pengurus sebagai pengelola utama yang bertanggung jawab terhadap operasional. (2) Audit internal atau satuan pengawas yang memastikan kepatuhan terhadap

aturan dan kebijakan. (3) Audit eksternal sebagai pihak independen yang memberi legitimasi objektif. Apabila ketiga lapisan ini berjalan efektif, maka peluang terjadinya fraud akan menurun secara signifikan. Dari sudut pandang ilmiah, terdapat beberapa hal penting:

Tata Kelola Koperasi

Prinsip *Good Cooperative Governance* (GCG) juga memiliki kontribusi besar dalam menekan asimetri informasi. Widiyanto dan Utomo (2022) menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan faktor paling menentukan dalam membangun kepercayaan anggota. Akuntabilitas berarti setiap keputusan dan laporan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada anggota maupun regulator. Namun, efektivitas penerapan *Good Cooperative Governance* tidak selalu konsisten. Soebijono (2016) menemukan bahwa meskipun prinsip transparansi dan akuntabilitas sudah mulai diterapkan, kelemahan dalam sistem informasi membuat pengelolaan data belum berjalan maksimal. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penerapan *Good Cooperative Governance* dalam koperasi lebih bersifat normatif (sekadar formalitas) atau sudah substantif (benar-benar dilaksanakan sesuai prinsip). Studi lain juga menunjukkan hasil yang bervariasi. Lestari dan Purwantini (2023) menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan prinsip *responsibility*, *independence*, *fairness*, dan budaya organisasi tidak memberikan pengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak semua prinsip *Good Cooperative Governance* memiliki efek yang sama terhadap kinerja koperasi, sehingga perlu ada penekanan lebih pada prinsip-prinsip inti yang paling relevan. Menariknya, penelitian Handayani dan Darmawan (2024) menunjukkan bahwa akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan berpengaruh positif terhadap kinerja koperasi, sedangkan transparansi justru berpengaruh negatif signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa keterbukaan yang berlebihan dapat menimbulkan konflik internal, seperti data keuangan digunakan untuk membangun opini negatif atau memperkuat friksi antaranggota. Dari sisi teori organisasi, fenomena ini dapat dipahami melalui perspektif *organizational behavior*, di mana terlalu banyak informasi yang tidak diolah dengan baik justru menimbulkan *information overload* dan konflik kepentingan.

Dari perspektif akademik, dapat disimpulkan bahwa Audit internal berperan bukan hanya sebagai alat kontrol teknis, tetapi juga instrumen strategis yang menumbuhkan kepercayaan anggota serta memperkuat legitimasi kepemimpinan pengurus. *Good Cooperative Governance* dalam koperasi masih menghadapi dilema efektivitas: prinsip akuntabilitas terbukti sangat berpengaruh, sementara transparansi yang tidak dikelola dengan baik justru berpotensi memicu konflik. Fenomena ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara transparansi dan akuntabilitas. Transparansi harus dibarengi dengan mekanisme literasi

keuangan anggota dan audit internal agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dan digunakan secara konstruktif, bukan destruktif. Dengan demikian, integrasi antara audit internal yang efektif, penerapan *Good Cooperative Governance* yang substantif, dan peningkatan literasi keuangan anggota menjadi prasyarat utama dalam mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan keberlanjutan koperasi.

Asimetri Informasi

Hasil penelusuran literatur menegaskan bahwa asimetri informasi masih menjadi isu sentral dalam koperasi. Iswandi (2025) menunjukkan bahwa laporan keuangan kerap hanya dipandang sebagai formalitas dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), bukan sebagai instrumen pengambilan keputusan yang berbasis data. Hal ini memperbesar information gap karena anggota tidak memperoleh akses informasi yang memadai untuk memahami kondisi riil koperasi. Dari sudut pandang *agency theory*, kondisi ini mempertegas adanya relasi *principal agent* yang timpang, di mana pengurus (agent) menguasai informasi lebih banyak dibanding anggota (principal).

Lebih lanjut, lemahnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam *Good Cooperative Governance* (GCG) memperburuk kondisi ini (Nainggolan, Parulian, & Siregar, 2016). Transparansi yang hanya bersifat administratif tanpa diikuti keterbukaan substantif menjadikan laporan keuangan sekadar simbol legitimasi, bukan alat komunikasi. Hal ini menunjukkan adanya gejala *symbolic compliance*, yaitu kepatuhan formal terhadap regulasi tanpa implementasi yang bermakna.

Selain faktor tata kelola, rendahnya partisipasi anggota dalam RAT juga menjadi penyebab utama lemahnya fungsi kontrol (Soebijono, Binawati, & Erstiawan, 2016). Partisipasi anggota seharusnya menjadi elemen inti koperasi karena koperasi berdiri atas prinsip demokrasi ekonomi. Namun, rendahnya literasi keuangan anggota menyebabkan keterlibatan mereka hanya bersifat pasif. Sebagaimana ditunjukkan oleh Yusma dan Sakti (2021), literasi keuangan yang rendah membuat anggota sulit memahami laporan keuangan sebagai instrumen pengawasan, sehingga fungsi RAT lebih sering berjalan sebagai forum seremonial daripada forum deliberatif.

Dari perspektif pengendalian, ketiadaan audit independen dan lemahnya pengendalian internal membuat laporan keuangan koperasi rentan terhadap bias, bahkan manipulasi (Novatiani et al., 2023). Hal ini menandakan belum optimalnya penerapan *three lines of defense* dalam tata kelola koperasi: (1) pengurus sebagai pengelola utama, (2) audit internal atau satuan pengawas sebagai pengendali internal, dan (3) audit eksternal sebagai pihak independen. Tanpa keberadaan mekanisme ini, akuntabilitas laporan keuangan sulit

diwujudkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan asimetri informasi dalam koperasi tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga struktural dan kultural. Secara struktural, kelemahan sistem pengawasan internal serta rendahnya kualitas laporan keuangan menyebabkan ketergantungan anggota pada pengurus. Secara kultural, rendahnya literasi keuangan dan partisipasi anggota memperkuat dominasi pengurus dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks teori tata kelola, kondisi ini dapat dipahami melalui perspektif *stakeholder theory*. Anggota sebagai pemangku kepentingan utama seharusnya memiliki hak penuh atas informasi keuangan. Namun, karena keterbatasan literasi dan mekanisme distribusi informasi yang lemah, hak tersebut tidak dapat terwujud secara optimal. Hal ini menimbulkan *power asymmetry* yang berimplikasi pada berkurangnya kepercayaan anggota terhadap pengurus. Secara praktis, temuan ini menekankan bahwa audit internal harus diposisikan bukan hanya sebagai fungsi administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat akuntabilitas dan partisipasi anggota. Audit internal yang efektif dapat berperan sebagai “jembatan informasi” yang memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara transparan, dipahami oleh anggota, serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan kolektif.

Dengan demikian, upaya mengurangi asimetri informasi tidak cukup hanya melalui peningkatan sistem pelaporan, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan literasi keuangan anggota, penguatan audit internal, serta pengawasan eksternal yang konsisten. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar *Good Cooperative Governance* yang menekankan keseimbangan antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah literatur, penelitian ini menarik kesimpulan dan menegaskan bahwa asimetri informasi dalam aspek perpajakan koperasi merupakan persoalan mendasar yang berdampak langsung pada tingkat kepatuhan pajak, efektivitas tata kelola, dan keberlanjutan kelembagaan. Asimetri informasi terutama disebabkan oleh dominasi pengurus dalam menguasai data keuangan dan informasi pajak, lemahnya penerapan prinsip *Good Cooperative Governance* (GCG), rendahnya literasi pajak dan akuntansi anggota, serta belum optimalnya mekanisme audit internal dan eksternal. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya partisipasi anggota, meningkatnya risiko moral hazard, hingga turunnya kredibilitas laporan pajak dan keuangan koperasi di mata regulator maupun publik.

Sebaliknya, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan audit internal dan pengawasan eksternal yang konsisten dapat berfungsi sebagai instrumen strategis untuk

mempersempit kesenjangan informasi, meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, serta menumbuhkan kepercayaan anggota terhadap pengelolaan pajak koperasi. Dengan demikian, strategi penguatan koperasi harus diarahkan pada penerapan prinsip *Good Cooperative Governance* yang substantif, peningkatan literasi perpajakan anggota, dan integrasi sistem pengawasan internal maupun eksternal.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas kajian asimetri informasi dengan menempatkan perpajakan koperasi sebagai isu utama yang sebelumnya belum banyak disentuh oleh riset terdahulu. Secara praktis, penelitian ini menawarkan rekomendasi penguatan tata kelola koperasi agar laporan keuangan lebih akuntabel, patuh pajak, dan berkelanjutan melalui kombinasi literasi pajak anggota, tata kelola berbasis *Good Cooperative Governance*, serta pengawasan multi-level.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus Tolong, Husain As, & S. R. (2020). Analisis kinerja keuangan koperasi simpan pinjam pada Koperasi Suka Damai. *Jurnal Ilmiah*, 2(1), 25–33.
- Apriyana, M., & Hasbi, S. (2020). Preferensi koperasi dalam melakukan konversi menjadi koperasi syariah: Studi kasus pada koperasi di wilayah Bogor. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(2), 173–190. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i2.2115>
- Atika Lusi Tania, A. L. T., Dewi, F. G., & Gamayuni, R. R. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi fraud pada koperasi simpan pinjam di Indonesia. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 13(1), 68–83. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v13i1.9694>
- Budiyono, T. B., & Indah, C. M. (2018). Tata kelola koperasi di Salatiga. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 257–266. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.257-266>
- Dhon, R., et al. (2020). Antecedents kecenderungan kecurangan akuntansi di koperasi. *Jurnal Akuntansi*, (January), xx–xx.
- Diffa Ayu Nindyatami Savitri, Puspitasari, S., & Maharani, C. A. (2023). Peranan OJK terhadap pengawasan keuangan koperasi simpan pinjam. *Cemerlang: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 3(3), 1–7. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i3.1320>
- Dwiyana, I. M. A. (2019). Analisis tren pada koperasi Primkoppos (Primer Koperasi Pegawai Pos) periode 2012–2015. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.23887/jap.v10i1.21034>
- Dyah, R., et al. (2021). Systematic literature review: Kualitas laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 37–48.
- Handayani, P. A., & Darmawan, N. A. S. (2024). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja pengelolaan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Jember. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 15(2), 448–463. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/78367>

- Iswandi, A. (2025). Tata kelola koperasi syariah di Indonesia: Studi literature review. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi Syariah*, 15(2), 101–109. <https://doi.org/10.59833/g1ge0e88>
- L. N. S. Yusma, Sakti, D. P. B., & F. L. M. (2021). Tata kelola koperasi di Kabupaten Lombok Timur (studi kasus pada koperasi simpan pinjam). *Jurnal Manajemen*, 9(2), 23–33.
- Lestari, E. R., & Purwantini, A. H. (2023). Pengaruh prinsip good corporate governance, manajemen risiko, dan budaya organisasi terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(2), 157–175. <https://doi.org/10.24036/jnka.v1i2.13>
- Manossoh, H. (2016). *Good corporate governance untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan*. PT Norlive Kharisma Indonesia.
- Moron, L. M., Herdi, H., & Rangga, Y. D. P. (2023). Pengaruh budaya kerja terhadap kinerja karyawan koperasi simpan pinjam Ikamala. *Jurnal Kompetitif*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.52333/kompetitif.v12i1.56>
- Nainggolan, K., Parulian, T., & Siregar, A. U. (2016). Indikator membangun good cooperative governance untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 14(2). <https://doi.org/10.18202/jam23026332.14.2.15>
- Novatiani, R. A., et al. (2023). Pengaruh tata kelola koperasi terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 285–291.
- NTB Satu Data. (2024). *Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Lombok Timur menurut kecamatan*. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Ramadhan, D. D. (2018). Pelaksanaan pendidikan koperasi dan partisipasi anggota koperasi mahasiswa. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 6(3), 343–348.
- Sanjaya, V., & Febrian, W. D. (2024). Pengaruh disiplin kerja, lingkungan kerja nonfisik, dan gaya kepemimpinan otoriter terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Madani*, 6(1), 29–45. <https://doi.org/10.51353/jmbm.v6i1.788>
- Sari, N. (2023). Pengaruh sistem informasi akuntansi dan satuan pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Putra Perdana Indonesia*.
- Seisarita, D. D. A. F. (2015). Peran sistem pengendalian manajemen pada prestasi karyawan. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 3(9), 1689–1699.
- Soebijono, T. (2016). *Analisis good corporate governance pada koperasi*. Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya.
- Soebijono, T., Binawati, L., & Erstiawan, M. S. (2016). *Analisis good corporate governance pada koperasi*. STIKOM Surabaya.
- Sofiani, T. (2014). Konstruksi norma hukum koperasi syariah dalam kerangka sistem hukum koperasi nasional. *Jurnal Hukum*, 12, 135–151.
- Takdir Jumaidi, L., & Lestari, A. H. (2021). Pengaruh sistem informasi akuntansi manajemen, gaya kepemimpinan, trust, dan ketidakpastian lingkungan terhadap kinerja manajerial. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 19(1), 36–50.
- Widiyanto, W., & Utomo, D. C. (2022). Review penelitian terkait tata kelola dan akuntabilitas koperasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 13(2), 103–121. <https://doi.org/10.36694/jimat.v13i2.423>
- Yusran, R. R., & Y. (2019). Analisis asimetri informasi, sosialisasi, serta ukuran usaha terhadap pemahaman UMKM atas SAK ETAP. *Jurnal Akrab Juara*, 4(5), 218–226.